

# SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



## BPK SERAHKAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

### ATAS LKPD PROVINSI NTB TA 2016

BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat menyerahkan LHP atas LKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat TA 2016 pada hari Rabu, 31 Mei 2017 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penyerahan dihadiri oleh Anggota VI BPK RI, Bpk **Dr. Harry Azhar Azis, MA**, Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTB, dan Gubernur Provinsi NTB.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2016 merupakan Laporan Keuangan **kedua** yang disusun Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan menggunakan basis akrual sebanyak tujuh laporan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2004 Pasal 16 ayat (1), Pemeriksaan LKPD TA 2016, pemberian opini LKPD didasarkan pada empat kriteria, yaitu (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (2) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektifitas sistem pengendalian intern (SPI).

BPK telah memeriksa Laporan Keuangan tersebut yang meliputi Pendapatan dengan realisasi sebesar Rp3,949 triliun dari anggaran sebesar Rp3,803 triliun, Belanja dan Transfer dengan realisasi senilai Rp3,764 triliun dari anggaran senilai Rp3,953 triliun, total aset senilai Rp11,890 triliun serta jumlah kewajiban ditambah ekuitas senilai Rp11,890 triliun.

LKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat TA 2016 memperoleh **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**. Pencapaian opini WTP ini adalah yang **keenam kalinya** bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut per 31 Desember 2016 atas rekomendasi BPK RI untuk temuan pemeriksaan TA 2015 dan sebelumnya, mengungkapkan bahwa terdapat 1.311 rekomendasi senilai Rp91.384.688.015,76. Dari jumlah tersebut, telah ditindaklanjuti sebanyak 1.155 rekomendasi (88,10%), 95 rekomendasi belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut (7,25%); sebanyak 38 rekomendasi belum ditindaklanjuti (2,90%), serta sebanyak 23 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.

*Humas dan TU Kalan BPK Perwakilan Prov. NTB*